

PENGARUH SAP DAN SPI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN WONOGIRI

EFFECT OF SAP AND SPI ON QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS IN WONOGIRI REGENCY

Oleh : **Anggun Dharmaning Putri**

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

aaanggundharmaning@gmail.com

Abdullah Taman, M.Si.,CA.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Kabupaten Wonogiri dengan nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) = 0,444, koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) = 0,197 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,436 > 2,009. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Intern (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Kabupaten Wonogiri dengan nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) = 0,617, koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) = 0,381 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 5,436 < 2,009. (3) Terdapat pengaruh positif Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern (X_2) secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) di Kabupaten Wonogiri dengan nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2)}$) = 0,657, koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2)}$) = 0,431 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 17,803 > 1,60.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

The results showed that (1) There were positive and significant influence of Government Accounting Standards (X1) on Quality of Financial Statement (Y) in Wonogiri Regency with correlation coefficient (r_{x_1y}) = 0,444, coefficient of determination ($r^2_{x_1y}$) = 0,197 and $t_{count} > t_{table}$ is 3,436 > 2,009. (2) There is positive and significant influence of Internal Control System (X2) to Quality of Financial Statement (Y) in Wonogiri Regency with correlation coefficient value (r_{x_2y}) = 0,617, coefficient of determination ($r^2_{x_2y}$) = 0,381 and $t_{count} < t_{table}$ value is 5,436 < 2,009. There are positive influence of Government Accounting Standard (X1) and Internal Control System (X2) together on Quality of Financial Statement (Y) in Wonogiri Regency with correlation coefficient value ($R_{y(1,2)}$) = 0,657, coefficient of determination ($R^2_{y(1,2)}$) = 0.431 and $F_{count} > F_{table}$ is 17,803 > 1.60.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control System, Quality of Financial Statement

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran instansi atau SKPD dapat terlihat (Jamanson Sinaga, 2005). Alokasi transfer ke daerah semakin terus meningkat, ini tercermin dari total realisasi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2009 sebesar Rp336,2 triliun, naik dibandingkan capaian tahun 2008 senilai Rp293,6 triliun. Realisasi dana perimbangan tahun 2008, terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp78,42 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp179,51 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp20,79 triliun. Sementara sisa transfer ke daerah lainnya tercatat dalam realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2008 sebesar Rp13,72 triliun yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp7,51 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp6,21 triliun. Realisasi dana perimbangan ini merupakan komponen terbesar dana transfer ke daerah yakni 95,31 persen dari total dana yang ditransfer dari Pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan dana otonomi khusus dan penyesuaian mencapai 4,69 persen dari dana transfer ke daerah.

Dominasi dana perimbangan dalam total alokasi transfer ke daerah merupakan tren yang berjalan dari tahun ke tahun sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang memperkuat pilar keuangan daerah melalui transfer dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Namun, jumlah dana yang terus meningkat besar dan kewenangan mengelola yang semakin besar, tidak diikuti dengan kemampuan daerah dalam mengelolanya. Baik

secara administrasi maupun secara politik, anggaran tersebut belum dikelola dengan baik. Sangat banyak temuan BPK yang menunjukkan kelemahan daerah dalam mengelola anggaran seperti pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang tidak sesuai mekanisme APBD dan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara. Masalah lain adalah kelemahan dalam manajemen sehingga terjadi kekurangan/keterlambatan penerimaan daerah, sehingga banyak dana yang tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan membuka peluang penyalahgunaan. Akibatnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2008 misalnya, ada indikasi tindak pidana korupsi dan kerugian negara/daerah dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebesar Rp30 triliun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata-usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian. Kabupaten Wonogiri secara pemetaan bencana, merupakan daerah yang selalu mengalami kekeringan, maka bagaimana caranya agar APBD dapat menjawab permasalahan tersebut, (Sarwa Pramana, 2016). Dengan masih banyaknya temuan yang berdasarkan kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak-sesuaian laporan dengan standar yang

ditetapkan pemerintah, (Warisno, 2008). Sistem Pengendalian Intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1993) atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya (Warren & Fees, 2006). Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, maka faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan atau pelatihan terhadap tim penyusunan laporan. Pendidikan atau pelatihan ini diperlukan agar tim penyusunan laporan tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pendidikan atau pelatihan, kemampuan pegawai dapat

berkembang lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli. Kebutuhan pendidikan atau pelatihan (*training need*) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu, seperti penurunan prestasi pendidikan atau pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan. Akibatnya pendidikan atau pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD). Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Wonogiri secara pemetaan bencana, merupakan daerah yang selalu mengalami kekeringan, maka bagaimana caranya agar APBD dapat menjawab permasalahan tersebut, (Sarwa Pramana, 2016). Dengan masih banyaknya temuan yang berdasarkan kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, (Warisno, 2008). Sistem Pengendalian Intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1993) atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya (Warren & Fees, 2006). Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan supaya hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, maka faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan atau pelatihan terhadap tim penyusunan laporan. Pendidikan atau pelatihan ini diperlukan agar tim penyusunan laporan tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan

daerah karena telah terbiasa melalui adanya pendidikan atau pelatihan, kemampuan pegawai dapat berkembang lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli. Kebutuhan pendidikan atau pelatihan (*training need*) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu, seperti penurunan prestasi pendidikan atau pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan. Akibatnya pendidikan atau pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD).

Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian kausal komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat yang ada dan mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan yang bekerja pada Subbagian Keuangan dan Akuntansi di Kantor Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Di mana diambil sampel 5 kantor dari 27 SKPD di Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2017 untuk melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Kualitas Laporan Keuangan selama kurun waktu tertentu yang diukur dari kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan. Kualitas Laporan Keuangan

menjadi tolok ukur pencapaian pekerjaan yang sudah dilakukan dalam periode tertentu didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. Skala tersebut dimulai dari 1 (satu) “Sangat Tidak Setuju” sampai 5 (lima) “Sangat Setuju” untuk skenarionya dan jika responden menjawab 5 (lima) “Sangat Setuju” dari masing-masing variabel dan indikator, maka cenderung bahwa Kualitas Laporan Keuangan tinggi.

Terdapat dua variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Sistem Pengendalian Intern (X2). Variabel independen yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi keberadaan dari variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern ini diukur menggunakan skala likert satu sampai lima. Skala tersebut dimulai dari 1 (satu) “Sangat Tidak Setuju” sampai 5 (lima) “Sangat Setuju” untuk skenarionya dan jika responden menjawab 5 (lima) “Sangat Setuju” dari masing-masing variabel dan indikator, maka cenderung bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern tinggi dan cukup baik.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1988:117). Sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan

yang bekerja di Subbagian Keuangan dan Akuntansi Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri.

5. Jenis dan Sumber Data

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang disebarluaskan kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut (Husein Umar, 2011:49). Kuesioner yang didistribusikan berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, kuesioner diberikan disertai dengan surat permohonan izin dan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Selain itu dalam mendistribusikan kuesioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas agar dapat memudahkan responden dalam memberikan jawaban secara lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*). Uji asumsi klasik terdiri

dari uji normalitas, uji linearitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh SAP dan SPI secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis deskriptif variabel Kualitas Laporan Keuangan diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 25 dan nilai terendah (*min*) sebesar 15 dengan rata-rata sebesar 21,1 dan standar deviasi sebesar 2,7. Cara mengetahui jumlah kelas interval digunakan rumus *Sturges (Sturges Rule)*, yaitu jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log n$, maka dapat diketahui jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log 50 = 6,6$ atau dibulatkan menjadi 7. Rentang data sebesar $25 - 15 = 10$. Dengan diketahui rentang data, maka dapat diperoleh panjang kelas interval masing - masing kelompok yaitu $10/7 = 1,4$. Berdasarkan perhitungan tersebut kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi variabel Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Kelas interval	Frekuensi
1	15 – 16,4	1
2	16,5 – 17,8	5
3	17,9 – 19,2	5
4	19,3 – 20,6	15
5	20,7 – 22	2
6	22,1 – 23,4	10
7	23,5 – 25	12
Jumlah		50

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:

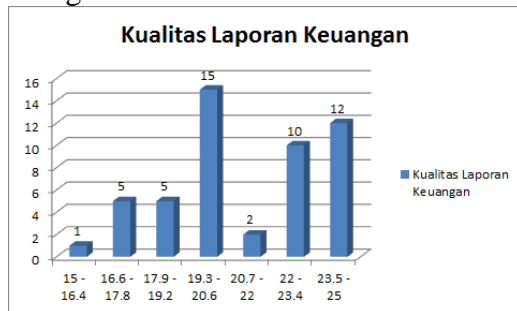


Diagram Batang Distribusi Frekuensi Kualitas Laporan Keuangan

Statistik Deskriptif SAP

Hasil analisis deskriptif variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 25 dan nilai terendah (*min*) sebesar 15 dengan rata-rata sebesar 21,3 dan standar deviasi sebesar 3. Cara mengetahui jumlah kelas interval digunakan rumus *Sturgess (Sturgess Rule)*, yaitu jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log n$, maka dapat diketahui jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log 50 = 6,6$ atau dibulatkan menjadi 7. Rentang data sebesar $25 - 15 = 10$. Dengan diketahui rentang data, maka dapat diperoleh panjang kelas interval masing - masing kelompok yaitu $10/7=1,4$. Berdasarkan perhitungan

tersebut kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Kelas interval	Frekuensi
1	15 – 16,4	3
2	16,5 – 17,8	5
3	17,9 – 19,2	5
4	19,3 – 20,6	8
5	20,7 – 22	4
6	22,1 – 23,4	9
7	23,5 – 25	16
Jumlah		50

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:

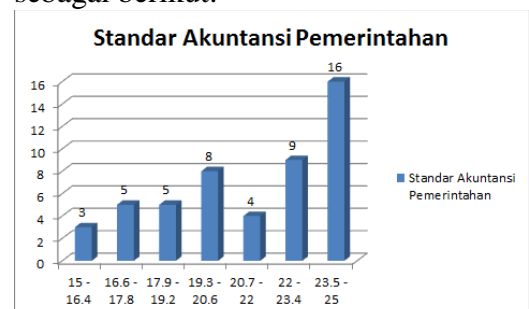


Diagram Batang Distribusi Frekuensi Standar Akuntansi Pemerintahan

Statistik Deskriptif SPI

Hasil analisis deskriptif variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai tertinggi (*max*) sebesar 45 dan nilai terendah (*min*) sebesar 27 dengan rata-rata sebesar 36,4 dan standar deviasi sebesar 3,8. Cara mengetahui jumlah kelas interval digunakan rumus *Sturgess (Sturgess Rule)*, yaitu jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log n$, maka dapat diketahui jumlah kelas interval = $1 + 3,3 \log 50 = 6,6$ atau dibulatkan menjadi 7. Rentang data sebesar $45 - 27 = 18$. Dengan diketahui rentang data, maka

dapat diperoleh panjang kelas interval masing - masing kelompok yaitu $18/7=2,6$. Berdasarkan perhitungan tersebut kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi variabel Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern

No	Kelas interval	Frekuensi
1	27 – 29,6	1
2	29,7 – 32,2	5
3	32,3 – 34,8	9
4	34,9 – 37,5	19
5	37,6 – 40	8
6	40 – 42,6	4
7	42,7 – 45	4
Jumlah		50

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, dapat digambarkan histogram sebagai berikut:

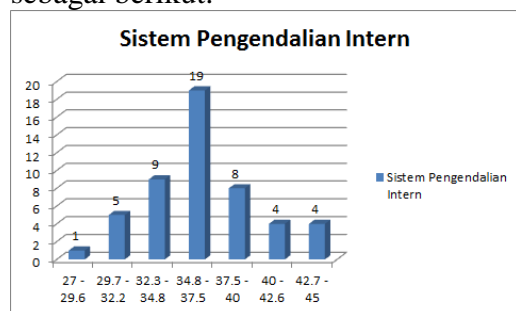


Diagram Batang Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus nilai $Z_{kurtois}$, jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel maka distribusi tidak normal. Tingkat signifikansi 0,05 nilai Z tabel = 1.96.

Uji Multikolinieritas

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabelindependen lebih kecil

dari 5 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Uji Linieritas

Berdasarkan hasil uji linieritas menunjukkan bahwa nilai F hitung variabel bebas lebih kecil dari F tabel, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan terikat (Kualitas Laporan Keuangan) adalah linier.

Uji Heterokedastisitas

Dari hasil heteroskedastisitas terhadap masing-masing variabel independen diperoleh p -value ($sig-t$) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen.

3. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis Pertama

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan probabilitas ($sig-t$) sebesar 0,001 yang nilainya dibawah 0,05 menunjukkan bahwa PenerapanStandar Akuntansi Pemerintahan (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah signifikan. Artinya semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka Kualitas Laporan Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Akuntansi di Kantor Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga akan mengalami peningkatan. Jika ditinjau dari nilai r Square sebesar 0,197, artinya 19,7% Kualitas Laporan

Kuangan dipengaruhi oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, sedangkan sebesar 80,3% dipengaruhi oleh variabel selain Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Regresi Linier Sederhana

Variabel	Sig.	t _{hitung}
X ₁ -Y	0,001	3,436

$$Y = 12,657 + 0,395x$$

Pengujian Hipotesis Kedua

Sistem Pengendalian Intern (X₂) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan probabilitas (*sig-t*) sebesar 0,000 yang nilainya di bawah 0,05 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah signifikan.

Hasil Regresi Linier Sederhana

Variabel	Sig.	t _{hitung}
X ₂ -Y	0,000	5,436

$$Y = 4,905 + 0,444x$$

Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2)} = 0,431$) artinya besarnya kontribusi kedua variabel bebas tersebut terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 43,1%, sedangkan sisanya 56,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig t
Konstanta	2,758	2,009	0,000
X ₁	0,216	5,112	0,048
X ₂	0,377	1,640	0,000
F hitung	17,803		
F tabel	1,60		
(R _{y(1,2)})	0,657		
Sig F	0,000		
Koefisien Determinasi (R ² _{y(1,2)})	0,431		

$$Y = 2,758 + 0,216 X_1 + 0,377X_2$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) berpengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X₁ sebesar 0,395 menyatakan bahwa setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,395 satuan. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu 0,001 < 0,05 mengindikasikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X₂) berpengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X₂ sebesar 0,444 menyatakan bahwa setiap

kenaikan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,444 satuan. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan $Y = 12,657 + 0,395x$, nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) = 0,444, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) = 0,197 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,436 > 2,009$. Hal ini berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan semakin baik mengakibatkan Kualitas Laporan Keuangan juga baik, begitu pula dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang semakin rendah maka Kualitas Laporan Keuangan akan menurun.

Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan $Y = 4,905 + 0,444$,

nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) = 0,617, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) = 0,381 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,640 < 2,009$. Hal ini menunjukkan semakin meningkat Sistem Pengendalian Intern mengakibatkan Kualitas Laporan Keuangan juga akan tinggi, begitu pula dengan Sistem Pengendalian Intern yang semakin rendah maka Kualitas Laporan Keuangan akan menurun.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan $Y = 2,758 + 0,216 X_1 + 0,377X_2$, nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2)}$) = 0,657, koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2)}$) = 0,431 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $17,803 > 1,60$.

Saran

PIHAK PEMDA

Meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hasil dari laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggung jawabkan. Sistem Pengendalian Intern lebih diaktifkan lagi agar sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang sama yang didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak dengan menambah variabel pendukung misalnya pendidikan atau pelatihan terhadap tim penyusunan laporan dan lain – lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adhi dan Suhardjo. (2013). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang
- Aldiani, Sulani. (2010). *Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi 12. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Arikunto Suharsimi. (1988). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian Indra. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta
- Damanik, Citra. (2011). *Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
<http://repository.usu.ac.id/handle/23456789/25663>. [diakses pada Desember 2016]
- Darise Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks. Jakarta
- Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research Jilid 3*. Andi. Yogyakarta
- Halim, Abdul, (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2009). *Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN 2010
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. (Online), artikel 1, No. 42004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyadi. (1993). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Mulyana, Budi, *Penggunaan Akuntansi Akrua di Negara-Negara Lain; Tren di Negara-Negara Anggota OECD*
- Mustika, Febrina. (2011). *Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan*

*Kualitas Laporan Keuangan
Melalui Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern
Sebagai Variabel Intervening.
Skripsi UPI*

Nordiawan Deddi. (2006). *Akuntansi
Sektor Publik*. Salemba Empat.
Jakarta

Ovita Charolina. (2013). *Pengaruh
Implementasi Pengelolaan
Keuangan dan Pengalaman Kerja
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan KPU*

Pabundu, Tika. (2006). *Budaya
Organisasi dan Peningkatan
Kinerja Perusahaan*. PT Bumi
Aksara. Jakarta